

SISTEM EKONOMI PANCASILA SEBAGAI SOLUSI UNTUK TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

¹Hairul Amren, ²I Made Adikesuma, ³Stifhany Margaretha, ⁴Syifa Armiyanti,
⁵Tessalonika Silitonga

¹²³⁴⁵Politeknik Penerbangan Medan

hairulamren123@gmail.com, adikesuma03@gmail.com, stifhany92@gmail.com,
syifarmiyantii@gmail.com, tessalonika20okt@gmail.com

ABSTRACT

The Pancasila Economic System, which is based on Pancasila values, offers alternative solutions to address global economic challenges. This system emphasizes the balance between individual and community interests with the aim of achieving shared prosperity. The principle of social justice promoted by Pancasila Economics can address the economic gap exacerbated by globalization. In addition, the principle of mutual cooperation and collaboration is important in creating synergy for sustainable economic development. Economic independence emphasized in the Pancasila Economic System helps developing countries reduce dependence on developed countries by utilizing local potential. This system also emphasizes environmental sustainability as a response to the challenges of climate change. However, the implementation of the Pancasila Economic System faces challenges, including translating Pancasila values into concrete economic policies, unequal distribution of resources, dependence on natural resources, lack of innovation and technology, complex bureaucracy, and corruption. With strong political commitment and active participation from all stakeholders, the Pancasila Economic System can be the foundation for more inclusive, equitable, and sustainable economic development.

Kata kunci : Policy, Economic System, Pancasila

ABSTRAK

Sistem Ekonomi Pancasila, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi tantangan ekonomi global. Sistem ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Ekonomi Pancasila dapat mengatasi kesenjangan ekonomi yang diperburuk oleh globalisasi. Selain itu, prinsip gotong royong dan kerjasama menjadi penting dalam menciptakan sinergi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemandirian ekonomi yang ditekankan dalam Sistem Ekonomi Pancasila membantu negara berkembang mengurangi ketergantungan pada negara maju dengan memanfaatkan potensi lokal. Sistem ini juga menekankan keberlanjutan lingkungan sebagai respon terhadap tantangan perubahan iklim. Namun, implementasi Sistem Ekonomi Pancasila menghadapi tantangan, termasuk penerjemahan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi yang konkret, ketidakmerataan distribusi sumber daya, ketergantungan pada sumber daya alam, kurangnya inovasi dan teknologi, birokrasi kompleks, serta korupsi. Dengan komitmen politik yang kuat dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, Sistem Ekonomi Pancasila dapat menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata kunci : Kebijakan, Sistem Ekonomi, Pancasila

PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yang terdiri dari lima sila sebagai dasar negara Indonesia. Sistem ini dianggap sebagai solusi alternatif untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Pada dasarnya, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu alasan utama mengapa Sistem Ekonomi Pancasila relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global adalah karena sistem ini mengedepankan prinsip keadilan sosial. Di tengah globalisasi yang sering kali memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin dalam satu negara, prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Ekonomi Pancasila menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ekonomi Pancasila berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Ekonomi Pancasila menekankan pada prinsip gotong royong dan kerjasama. Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, kolaborasi dan kemitraan menjadi sangat penting. Sistem Ekonomi Pancasila mendorong kerjasama antara berbagai sektor, baik itu sektor publik, swasta, maupun masyarakat, untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan ekonomi. Prinsip gotong royong ini juga relevan dalam menghadapi krisis ekonomi global, di mana solidaritas dan kerjasama internasional menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi. Prinsip kemandirian ekonomi yang diusung oleh Sistem Ekonomi Pancasila juga menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Globalisasi sering kali membuat negara-negara berkembang tergantung pada negara-negara maju, baik dari segi teknologi, modal, maupun pasar. Dengan menekankan pada kemandirian ekonomi, Ekonomi Pancasila mendorong pengembangan potensi ekonomi domestik, inovasi lokal, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini dapat membantu negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi global.

Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada keberlanjutan lingkungan. Dalam era perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, pendekatan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan menjadi sangat penting. Ekonomi Pancasila mendorong penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Ini sejalan dengan agenda global untuk pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Namun, implementasi Sistem Ekonomi Pancasila juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi yang konkret dan operasional. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, regulasi yang mendukung, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila. Selain itu, diperlukan juga penyesuaian dengan dinamika ekonomi global dan inovasi dalam mengadaptasi nilai-nilai Pancasila ke dalam konteks ekonomi yang terus berkembang. Sistem Ekonomi Pancasila menawarkan alternatif yang relevan dan potensial dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan prinsip keadilan sosial, gotong royong, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, Sistem Ekonomi Pancasila dapat menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Meskipun implementasinya tidak mudah dan penuh tantangan, potensi manfaat yang ditawarkan oleh Sistem Ekonomi Pancasila membuatnya layak untuk diupayakan sebagai solusi bagi tantangan ekonomi global yang dihadapi oleh Indonesia dan dunia.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Maksud dari

penerapan Sistem Ekonomi Pancasila adalah untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perekonomian nasional dan global. Sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat kemandirian ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai gotong royong dan solidaritas, mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat

LANDASAN TEORI

A. Teori Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare Economics*)

Ekonomi kesejahteraan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang fokus pada bagaimana distribusi sumber daya dan pendapatan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, teori ini sangat relevan karena salah satu tujuan utama dari Ekonomi Pancasila adalah mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya distribusi pendapatan yang merata dan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi kesejahteraan yang menilai kebijakan ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan total masyarakat.

B. Teori Ekonomi Institusional (*Institutional Economics*)

Teori Ekonomi Institusional menekankan pentingnya lembaga (institusi) dan aturan dalam menentukan kinerja ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila mengakui peran penting institusi dalam mencapai tujuan ekonomi. Dalam Ekonomi Pancasila, institusi-institusi seperti koperasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan lembaga-lembaga sosial lainnya berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara adil. Teori ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai budaya dan sosial yang mempengaruhi perilaku ekonomi, yang sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong dan solidaritas.

C. Teori Ekonomi Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based View*)

Teori ini berfokus pada pentingnya sumber daya internal sebagai dasar untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, teori ini mendukung konsep kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya lokal. Ekonomi Pancasila menekankan pengembangan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh Indonesia, serta inovasi teknologi lokal, sebagai cara untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Teori ini juga relevan dalam upaya menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab.

D. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Teori Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Sistem Ekonomi Pancasila sangat selaras dengan konsep ini, karena salah satu tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pancasila menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam proses pembangunan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang. Ini mencakup penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, pengurangan emisi karbon, dan pelestarian ekosistem. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana Ekonomi Pancasila dapat diterapkan untuk mencapai

pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis konsep Sistem Ekonomi Pancasila sebagai solusi atas tantangan ekonomi global, serta mengevaluasi potensi dan tantangan implementasinya di Indonesia.

Metode studi pustaka memungkinkan peneliti menggali data dan informasi dari berbagai sumber literatur sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, artikel kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Zed (2004), yang menyatakan bahwa penelitian kepustakaan menekankan pentingnya sumber literatur sebagai basis utama pengumpulan dan analisis data dalam kajian ilmiah.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan, seperti keadilan sosial, gotong royong, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Teknik ini digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Krippendorff (2013), yaitu untuk menafsirkan isi pesan dari teks secara sistematis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ideologi yang menjadi dasar negara Indonesia. Sistem ini menekankan pada keadilan sosial, gotong royong, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, meskipun prinsip-prinsip tersebut ideal, implementasi Sistem Ekonomi Pancasila menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya ekonomi. Meskipun prinsip keadilan sosial menjadi landasan utama, dalam kenyataannya, ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat mencolok, dengan daerah perkotaan menikmati lebih banyak kemajuan ekonomi dan akses terhadap fasilitas publik dibandingkan dengan daerah pedesaan yang seringkali tertinggal. Selain itu, kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah juga masih lebar. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini, termasuk kebijakan yang kurang efektif, praktik korupsi, dan kurangnya infrastruktur yang memadai di daerah-daerah tertinggal. Ketidakmerataan ini menghambat tujuan utama Sistem Ekonomi Pancasila untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam juga menjadi masalah serius. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, batubara, dan kelapa sawit. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada ekspor komoditas mentah membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Ketika harga komoditas turun, ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan industri hilir dan meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

Kurangnya inovasi dan teknologi juga menjadi hambatan dalam pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila. Inovasi dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Namun, investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-

negara maju. Kurangnya inovasi dan teknologi menghambat kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global dan memperkuat kemandirian ekonomi. Meningkatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan penelitian untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi. Ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Birokrasi yang kompleks dan korupsi juga menjadi masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan praktik korupsi seringkali menghalangi investasi, memperlambat pembangunan infrastruktur, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif dan adil. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ketidakstabilan ekonomi global juga menjadi tantangan bagi Sistem Ekonomi Pancasila. Krisis keuangan, fluktuasi harga komoditas, dan perang dagang di tingkat global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Memperkuat basis ekonomi domestik, diversifikasi ekonomi, dan pengelolaan risiko yang efektif. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang lebih resilient terhadap guncangan eksternal sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Selain itu, penguatan kerjasama internasional juga diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih efektif. Tantangan lingkungan juga merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat merusak lingkungan dan sumber daya alam. Indonesia menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim yang dapat mengancam kesejahteraan jangka panjang. Kebijakan yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan harus diterapkan untuk memastikan kelestarian lingkungan.

Meskipun Sistem Ekonomi Pancasila menawarkan prinsip-prinsip yang ideal untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, penerapannya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Ketidakmerataan distribusi sumber daya, ketergantungan pada sumber daya alam, kurangnya inovasi, birokrasi yang kompleks dan korupsi, ketidakstabilan ekonomi global, serta tantangan lingkungan adalah beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, serta upaya berkelanjutan untuk reformasi dan inovasi. Sistem Ekonomi Pancasila dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila, yang didasarkan pada lima prinsip dasar Pancasila, menawarkan pendekatan yang unik dan relevan untuk mengatasi tantangan ekonomi global. Dalam konteks global yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, gotong royong, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Sistem Ekonomi Pancasila sangat relevan dalam konteks ekonomi global saat ini, di mana ketimpangan ekonomi menjadi masalah serius di banyak negara. Globalisasi, meskipun membawa banyak manfaat, juga memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dalam banyak kasus, manfaat dari globalisasi cenderung lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju dan kelompok ekonomi atas, sementara negara-negara berkembang dan kelompok ekonomi bawah sering kali tertinggal. Sistem Ekonomi Pancasila, dengan fokusnya pada distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi, dapat membantu mengatasi ketimpangan ini. Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan

ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, prinsip gotong royong atau kerja sama kolektif yang menjadi ciri khas Pancasila sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Di tengah persaingan global yang ketat, kolaborasi antara berbagai pihak - pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Gotong royong mendorong kerjasama yang harmonis, di mana setiap pihak berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Dalam konteks internasional, semangat gotong royong ini dapat diterapkan melalui kerjasama antarnegara untuk menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis keuangan, dan perdagangan internasional. Dengan bekerja bersama, negara-negara dapat mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kemandirian ekonomi, sebagai salah satu prinsip utama dari Sistem Ekonomi Pancasila, juga merupakan jawaban terhadap tantangan ketergantungan ekonomi yang sering kali dihadapi oleh negara-negara berkembang. Ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya alam dan ekspor komoditas mentah membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu bersaing di pasar internasional. Pengembangan industri manufaktur, teknologi, dan jasa, serta investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah dan meningkatkan daya saing ekonominya di kancah global.

Keberlanjutan lingkungan merupakan aspek lain dari Sistem Ekonomi Pancasila yang sangat relevan dalam konteks tantangan global saat ini. Perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lingkungan adalah masalah global yang memerlukan perhatian serius. Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Ini berarti bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta adanya investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Melalui adopsi prinsip keberlanjutan ini, Indonesia tidak hanya dapat melindungi lingkungan hidupnya tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan planet ini. Namun, untuk mengimplementasikan Sistem Ekonomi Pancasila secara efektif, diperlukan reformasi struktural dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip Pancasila dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif. Ini termasuk reformasi birokrasi untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Sektor swasta juga perlu berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dengan menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.

Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam menggerakkan ekonomi Pancasila. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan ekonomi adalah kunci untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta akses terhadap informasi dan teknologi, adalah faktor-faktor penting yang dapat memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian. Sistem Ekonomi Pancasila menawarkan solusi yang komprehensif dan relevan untuk mengatasi tantangan ekonomi global. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial, gotong royong, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, sistem ini dapat menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Meskipun penerapannya menghadapi berbagai tantangan, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta adaptasi terhadap dinamika global, Sistem Ekonomi Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat

untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Ekonomi Pancasila, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, menawarkan solusi komprehensif untuk tantangan ekonomi global dengan menekankan pada keadilan sosial, gotong royong, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip keadilan sosial membantu mengatasi ketimpangan ekonomi, sementara gotong royong mendorong kerjasama antara berbagai sektor dalam menghadapi krisis global. Kemandirian ekonomi mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah dengan mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, dan keberlanjutan lingkungan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak alam. Implementasi yang efektif membutuhkan reformasi struktural, komitmen pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat. Meski menghadapi tantangan, Sistem Ekonomi Pancasila memiliki potensi besar untuk menciptakan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta menjadi landasan kuat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di tengah dinamika global.

B. Saran

1. Melakukan analisis mendalam tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia, baik antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun antara kelompok ekonomi atas dan bawah
2. Meneliti implementasi prinsip gotong royong dalam konteks ekonomi Indonesia.
3. Melakukan evaluasi terhadap tingkat kemandirian ekonomi Indonesia, termasuk dalam hal produksi, konsumsi, dan teknologi.
4. Meneliti dampak birokrasi yang kompleks dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
5. Mengkaji peran pendidikan dan pelatihan dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi ekonomi global yang kompetitif.
6. Melakukan studi perbandingan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi dengan negara-negara lain yang memiliki konteks budaya dan ekonomi yang mirip atau berbeda.

DAFTAR PUSTAKA (huruf (font) Arial 11, Tebal)

- Agussalim. (2019). Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 2(2), 20–32. <http://saif1924.wordpress.com/2010/07/08/sejarah-dan-perkembangan-ekonomi-kapitalisme/diakses>
- Bachri, S., Lubis, A., Kriswanta, K., & ... (2021). Strategi Ekonomi Islam Untuk Pembangunan Sistem Ekonomi Pancasila di Desa Sukawijaya Tambelang Bekasi. *Prosiding EMAS* ..., 1(1), 87–100. <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/view/342%0Ahttps://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/download/342/179>
- Gunawan, M. I. (2020). Sistem Ekonomi Islam Sebagai Solusi Problematika Sistem Kapitalisme Dan Sistem Sosialisme. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 214–231. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.138>
- Haerisma, A. S. (2019). Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 187–199.
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.).

SAGE Publications

- Marsudi, K. E. R., & Purbasari, V. A. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA Implementation of the Pancasila Economic System in Indonesian Government Policies. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 27–42. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id./index.php/jief>
- Marsudi, K. E. R., & Santriati, A. T. (2022). Harmonisasi Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia. *El-Wasathiya*, 10(01), 43–67.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Puja Pangestu, F., Shelvia Rahmadiani, N., Tanzila Hardiyanti, N., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219. www.globalgoals.org
- Sundari, A., Asi, Y. S., & Bilgies, A. F. (2021). Peran Filsafat Ilmu Terhadap Ilmu Ekonomi Sebagai Landasan Rekonstruksi Ekonomi Pancasila. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(2), 179–192. <https://doi.org/10.52166/humanis.v13i2.2485>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.